



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640

Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

[SIARAN PERS]

Nomor: 019/RILIS/BKN/V/2021

Jakarta, 24 Juni 2021

Memasuki 73 Tahun Berkarya, BKN akan Berikan Penghargaan Pengelola Kepegawaian Terbaik Lewat Rakornas Kepegawaian 2021

Dalam perayaan puncak HUT ke-73 Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang digelar secara *hybrid* pada Kamis (24/6/2021), Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyampaikan bahwa BKN akan kembali menyelenggarakan ajang BKN Award sebagai bentuk apresiasi kepada Instansi Pengelola Kepegawaian Terbaik. Penghargaan akan diberikan secara langsung dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2021 bertajuk "*Transformasi Manajemen ASN Menuju Birokrasi yang Dinamis*" yang akan dilaksanakan pada 01 Juli 2021 Pukul 08.00 WIB atau 09.00 WITA secara *hybrid* di Kota Denpasar, Bali dan disiarkan langsung lewat *channel Youtube* BKN.

Pada perhelatan tahunan bagi pejabat pengelola kepegawaian di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) tersebut, BKN akan melakukan *launching* Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (SIMPEGNAS) secara resmi dalam rangka mendukung terwujudnya target satu data ASN sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 dan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peresmian SIMPEGNAS akan berlangsung bersamaan dengan dimulainya Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) ASN dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Non-ASN secara mandiri melalui aplikasi MySAPK berbasis mobile dan website mulai Juli – Oktober 2021.

Rakornas Kepegawaian 2021 akan dibuka oleh Wakil Presiden RI, K. H Ma'ruf Amin dan dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, dan Gubernur Bali Wayan Koster. Adapun sejumlah materi pembahasan yang diagendakan dalam Rakornas Kepegawaian 2021 meliputi: Kebijakan Penataan Kelembagaan Instansi Pemerintah & Manajemen ASN Menuju Birokrasi yang Dinamis yang akan disampaikan oleh Menteri PANRB; Kebijakan rekrutmen Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



2021 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; dan Penyelarasan Manajemen ASN untuk mewujudkan Birokrasi Dinamis melalui Transformasi Jabatan ASN oleh Wakil Kepala BKN, Deputi Bidang SDM KemenPANRB, dan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Selain materi pembahasan seputar rekrutmen ASN 2021, BKN juga menghadirkan sesi tanya jawab dengan tema “Penyelarasan Manajemen ASN untuk mewujudkan Birokrasi Dinamis melalui Transformasi Jabatan ASN” lewat diskusi panel bersama Sekretaris Utama BKN, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN.

Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja sama
Badan Kepegawaian Negara

§

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

